

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi di Indonesia yang dicetuskan sejak 23 tahun yang lalu terus berjalan dengan tetap berbenah pada arah perbaikan dan peningkatan mutu dan hasil, tanpa kecuali dibidang pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralisasi merupakan produk nyata dari pelaksanaan reformasi pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan dan pengganti UU No 2 Tahun 1989 memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yang semula *top down* menjadi *bottom up* dengan harapan peningkatan mutu pendidikan.

Implikasi desentralisasi pendidikan ini adalah adanya pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke daerah. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang pemerintah pusat atau provinsi sebagian dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Daerah yang menginginkan kemajuan, sangat antusias dan serius dalam merespon kehadiran otonomi pendidikan. Kabupaten/kota tidak menyia-nyikan kesempatan dan kepercayaan besar yang fundamental untuk memajukan pendidikan didaerahnya, sebagai tolak ukur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah bidang pendidikan yang berhasil dilakukan dengan baik, daerah dalam jangka panjang memiliki ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk kepentingan kesinambungan pembangunan didaerah. (Sumber: <http://ldiisumenep.org/otonomi-pendidikan-sebagai-jawaban-dalam-menghadapi-tantangan-dunia-pendidikan-dan-peningkatan-mutu-pendidikan-sekolah/> diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 20.20)

Otonomi pendidikan sebagai konsekuensi dan hasil reformasi telah menjadi komitmen politik sejak otonomi daerah diberlakukan. Pada saat mulai dilangsungkannya otonomi pendidikan tahun 2000 dengan diundangkannya UU Nomor: 22 Tahun 1999 dan UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Kini disempurnahkan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014) sudah mengubah semua peraturan dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus pendidikannya, mulai dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah.

Semua pihak tanpa terkecuali, utamanya pemerintah dan masyarakat di daerah harus mendukung dan melaksanakan pendidikan yang berotonomi harus disukseskan. Upaya otonomi pendidikan pada dasarnya sudah diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalan yang saat ini terjadi, sistem sentralisasi yang telah diberlakukan sudah tidak relevan untuk keadaan Indonesia yang plural, budaya beragam, juga masyarakat yang heterogen dan kompleks. Maka dari itu otonomi pendidikan merupakan sebuah yang harus dan wajib jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan tentu sangat berbeda dengan otonomi di bidang lainnya. Otonomi bidang pendidikan tidak hanya terpusat pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, justru kepala sekolah langsung sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.

Akses menuju pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini masih menjadi cita-cita bagi sebagian besar anak di Indonesia, hingga bahkan masih menjadi ilusi bagi anak-anak Indonesia yang jauh dari kata beruntung. Pendidikan menjadi hal utama yang harus ditangani oleh negara, dan didukung oleh seluruh masyarakat, karena pendidikan salah satu jalan untuk

mewujudkan harapan dan masa depan bangsa/negara yang lebih baik. Tetapi dalam mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah dihadapkan dengan banyak permasalahan yang ada salah satunya adalah meringankan beban peserta didik yang terdapat di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 7 tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua yaitu orang tua yaitu orang tua berhak berpesan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Namun pada kenyataan yang terjadi masih tingginya angka putus sekolah dan juga siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, salah satunya faktor dominannya adalah pada persoalan ekonomi, karena banyak diantara anak-anak usia sekolah berasal dari keluarga yang memiliki status sosial-ekonomi yang kurang mampu bahkan miskin. Dengan keadaan seperti ini membuat orang tua siswa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi dan biaya pendidikan lainnya yang tidak di tanggung oleh dana BOS.

Alasan diantaranya partisipasi yang sangat rendah pada pendidikan khususnya pada kelompok rumah tangga miskin ialah biaya pendidikan yang mahal dan tinggi dari biaya langsung sampai tidak langsung, biaya langsung seperti halnya iuran sekolah, buku, seragam, tas, dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung meliputi transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada angka rendahnya

partisipasi pendidikan masyarakat miskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama penyebab bagi angka putus sekolah dan banyaknya angka yang tidak lanjut ke jenjang SMA/SMK.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui APBN menetapkan “Program Indonesia Pintar” (selanjutnya disebut dengan PIP) adalah program yang diberikan pemerintah secara langsung kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah baik sekolah negeri maupun swasta, yang tergolong rumah tangga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria orang tua miskin menurut standar pelaksanaan PIP adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² perorang²
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester
- d. Tidakmemiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan tempat tinggal orang lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dengan kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 perbulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala-kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti: sepeda motor.

Penetapan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) dari yang semula melalui sekolah yang kini diubah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga miskin melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Selanjutnya rumah tangga memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa KIP tersebut ke sekolah untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program PIP. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketetapan sasaran penerima program PIP untuk menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai kuota dan sasaran yang tersedia.Selain itu,

mekanisme penyaluran manfaat program PIP juga diubah yaitu dari penyaluran manfaat PIP satu tahun penuh menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) didalam satu tahun anggaran. Dengan penyaluran manfaat dua kali tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (Drop Out) karena tidak tersedianya biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA) dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun besarnya jumlah dana yang disalurkan ke penerima manfaat PIP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Besarnya Dana Program Indonesia Pintar di Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Jenjang | Besarnya Dana |
|----|---------|-----------------------|
| 1 | SD | 450.000/siswa/tahun |
| 2 | SMP | 750.000/siswa/tahun |
| 3 | SMA | 1.000.000/siswa/tahun |

Sumber : pedoman PIP Tahun 2017

Besaran dana PIP yang diterima oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dimulai dari SD, SMP, dan SMA memiliki nominal yang berbeda-beda. Bantuan PIP ini dapat diterima setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Tetapi dapat pula diterima dalam setiap tahun pelajaran, hal ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang mengelola Program Indonesia Pintar. Dilihat dari tabel diatas dapat

dijelaskan bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar besar dana PIP yang diterima oleh peserta didik selama satu tahun sebesar 450.000. selanjutnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama besar dana PIP yang diterima peserta didik selama satu tahun yaitu sebesar 750.000 per siswa. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas besar dana PIP yang diterima peserta didik selama satu tahun yaitu sebesar 1.000.000 per siswa.

Dalam penelitian ini peneliti memusatkan penelitian pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, langkah-langkah dalam penyelenggaraannya yaitu, pendataan siswa yang menerima PIP melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, Pemberkasan yaitu data diri siswa yang menerima dana, pembuatan buku rekening siswa di damping Guru dan Kepala Sekolah, setelah itu dana langsung masuk ke rekening siswa tanpa perantara.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekolah-sekolah Menengah Pertama yang terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar dari koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Program
Indonesia Pintar koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor
Tengah Utara 2019

| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | SMP KATOLIK ST XAVERIUS PUTRA | 220 siswa | 50 siswa | 123 siswa |
| 2. | SMP KRISTEN KEFAMENANU | 48 siswa | 23 siswa | - |
| 3. | SMP NEGERI 1 KEFAMENANU | 323 siswa | 73 siswa | 59 siswa |
| 4. | SMP NEGERI 2 KEFAMENANU | - | - | - |
| 5. | SMP NEGERI FATUMFAUN | 219 siswa | 151 siswa | 94 siswa |
| 6. | SMP NEGERI NEONBAT | 212 siswa | 66 siswa | 34 siswa |
| 7. | SMP NEGERI MAUMOLO | 92 siswa | 200 siswa | 91 siswa |
| 8. | SMPK ST ANTONIUS PADUA SASI | 255 siswa | 159 siswa | - |
| 9. | SMPN MAUBELI | - | - | 51 siswa |
| 10. | SMPS AURORA | 185 siswa | 73 siswa | 59 siswa |
| 11. | SMPS PUTRI ST. XAVERIUS | 11 siswa | 12 siswa | 33 siswa |

*Sumber: Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU
2019*

Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, Program Indonesia Pintar (PIP) pada penerapannya memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah

umum yang dihadapi diantaranya pemberian dana PIP dari pemerintah diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Namun berdasarkan kenyataan, masih ditemukan siswa penerima PIP yang tidak sesuai dengan kriteria orang tua miskin yang telah diberlakukan masih banyak siswa penerima PIP yang tergolong keluarga mampu bahkan ada juga siswa yang orangtuanya memiliki pekerjaan tetap yang ikut menerima program indonesia pintar ini. hal ini terjadi karena setiap siswa yang dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan maka dinyatakan layak untuk mendapatkan program indonesia pintar ini. inilah yang menjadi alasan banyak siswa yang berasal dari keluarga yang tergolong mampu dapat menerima PIP dikarenakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan dengan mudah didapatkan oleh para siswa.

Tidak hanya itu saja, dana PIP juga tidak dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan pada siswa penerima PIP, diantaranya digunakan untuk: seragam, sepatu, tas, alat tulis dan lain-lain;. Namun kenyataannya masih ditemukan banyak siswa yang mendapatkan dana PIP mempunyai perlengkapan sekolah tidak memadai seperti sepatu, seragam dan tas sudah dalam keadaan koyak dan rusak. Hal ini karena orang tua siswa belum sepenuhnya mempergunakan dana PIP untuk keperluan sekolah melainkan dipergunakan untuk kebutuhan ekonomi.

Dari paparan permasalahan Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya rentan sekali terhadap kesalahan

dan penyelewengan. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP-SMP) di Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu keadaan dimana tidak sesuai cita-cita, harapan dan keinginan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menyebabkan adanya kesanksian, tantangan dan ketidakpuasan. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam masalah ini yaitu: **Bagaimanakah Peran Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) di Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis Mengenai peran koordinasi dalam Proses Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama (PIP-SMP) di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya berkenaan dengan kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Siswa Penerima PIP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan menjadi salah satu pedoman bagi para siswa penerima dalam menggunakan dana PIP agar sesuai pada kebutuhan yang menjadi sasaran dan tujuan dari Dana PIP.

b) Bagi Sekolah Penerima PIP

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar disekolah-sekolah penerima Dana PIP yang berada di Wilayah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara agar dijalankan sesuai prosedur yang ada.

c) Bagi Orang Tua Penerima PIP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna juga menjadi tambahan referensi dan pedoman bagi para orang tua penerima dana

PIP agar lebih memahami terkait manfaat dan tujuan dari dana PIP sehingga orang tua dapat membantu pihak sekolah dalam hal mengontrol dan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.